KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Ekonomi Syariah

Penguatan Ekonomi Syariah dan Pemberdayaan UMKM sebagai Motor Kemandirian Umat"

Disampaikan pada Talkshow Ekonomi dan Keuangan Syariah
dalam Rangka "Silahturahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) ICMI Tahun 2025

Denpasar, 5 Desember 2025

KH. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
Direktur Eksekutif KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

A. KNEKS DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Perjalanan KNKS Menjadi KNEKS

Perpres No. 91 Tahun 2016

KNKS
Komite Nasional Keuangan Syariah

Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perpres No. 28 Tahun 2020

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi Syariah
Kebaikan Untuk Semua

- **Industri Produk Halal**
- **Jasa Keuangan Syariah**
- **Keuangan Sosial Syariah**
- **Bisnis dan Kewirausahaan Syariah**

Anggota KNEKS

- Kemenko Perekonomian
- Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kemenko Maritim dan Investasi
- Kementerian Keuangan (KNEKS Secretariat)
- Kementerian Agama
- Ministry of State-owned Enterprises
- Kementerian PPN/BAPENAS
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- Kemenparekraf
- Kemenkop UKM
- Kemenperin
- Bank Indonesia
- Otoritas Jasa Keuangan
- Lembaga Penjamin Simpanan
- Kamar Dagang Indonesia
- Majelis Ulama Indonesia

Tugas

"Mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional"

Ruang Lingkup Ekonomi dan Keuangan Syariah

- Pengembangan Industri Produk Halal
- Pengembangan Industri Keuangan Syariah
- Pengembangan Dana Sosial Syariah
- Pengembangan dan Perluasan Kegiatan Usaha Syariah

1. Pemberian rekomendasi kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah
2. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah
3. Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah
4. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah

Penyelenggaraan Fungsi KNEKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres 28 Tahun 2020

Highlight Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia

Ekonomi Syariah | KNEKS — Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

#5 Global Muslim Travel Index (GMTI) *(#2 di 2018)* — crescent rating

#1 Impactful Achievement in Islamic Economics (CWLS) — ISDBI

#3 Biggest Shareholder IsDB — IsDB Islamic Development Bank

#3 Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2025 *(#11 di 2018)* — DinarStandard

#4 Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2025 *(#10 di 2018)* — REFINITIV

#6 Global Islamic Finance Report (GIFR), 2024 — CAMBRIDGE INSTITUTE OF ISLAMIC FINANCE

#3 Global Islamic Fintech Report 2024 *(#4 di 2021)* — DinarStandard

Kontribusi Sektor Halal Value Chain (HVC) terhadap GDP sebesar 26,73%, tumbuh 0,27% (yoy) pada Q2 2025

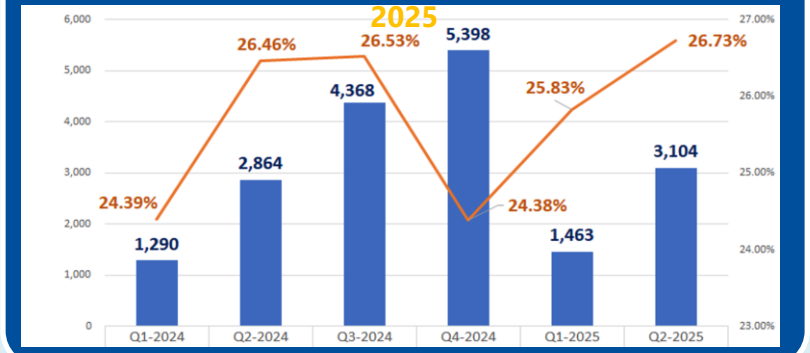

Sertifikasi Halal meningkat [2], total 2.8 Juta Sertifikat Halal telah diterbitkan dan 9.6 Juta produk halal (Sept '25)

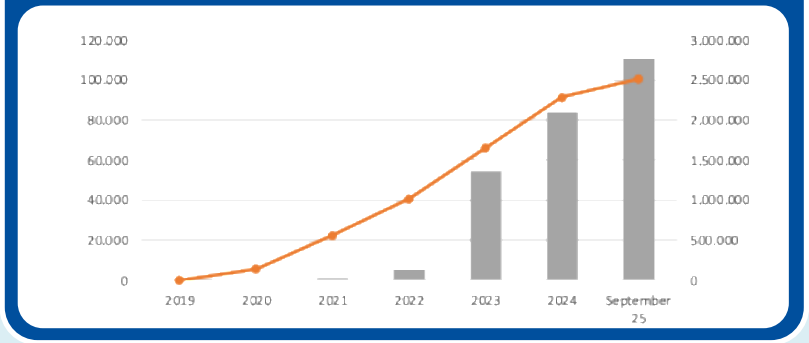

Ekspor Produk Halal 2024 mencapai USD 51,4 Miliar, dalam 6 tahun terakhir trend meningkat 7,08%[3]

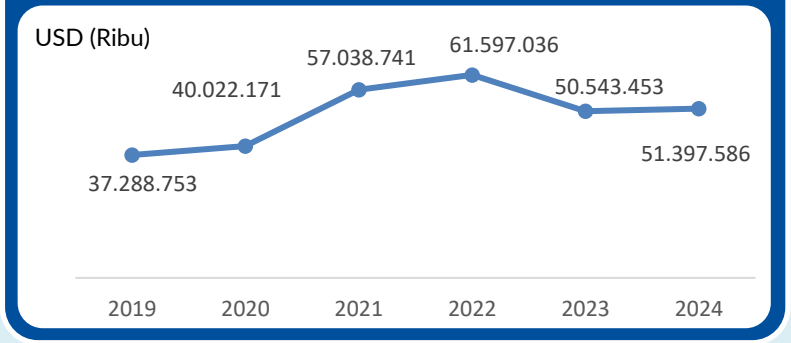

Total Aset Keuangan Syariah Sept'25 Rp12.698 Tiliun; Tumbuh 26,4% (yoy)

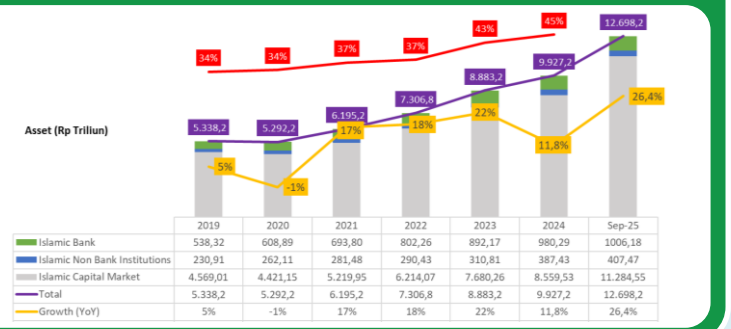

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Sep-25
Islamic Bank	538,32	608,89	693,80	802,26	892,17	980,29	1006,18
Islamic Non Bank Institutions	230,91	262,11	281,48	290,43	310,81	387,43	407,47
Islamic Capital Market	4.569,01	4.421,15	5.219,95	6.214,07	7.680,26	8.559,53	11.284,55
Total	5.338,2	5.292,2	6.195,2	7.306,8	8.883,2	9.927,2	12.698,2
Growth (YoY)	5%	-1%	17%	18%	22%	11,8%	26,4%

Akumulasi Cash Waqf sebesar Rp 3,03T (Jun'25); ZIS-DSKL tumbuh 25% di 2024 (yoy)

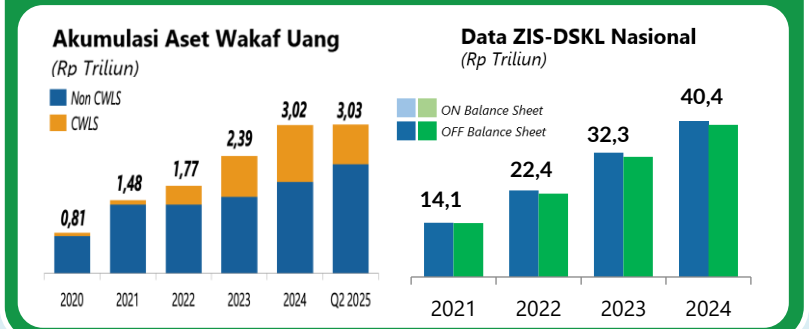

Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah telah Terbentuk di 31 Provinsi

1) BPJPH Data; 2) Ditjen PEN, MoT Data, Proceed, 3) Including Cash Waqf, MoF, BWI & Baznas, Proceed

Implementasi Modul UMKM Industri Halal

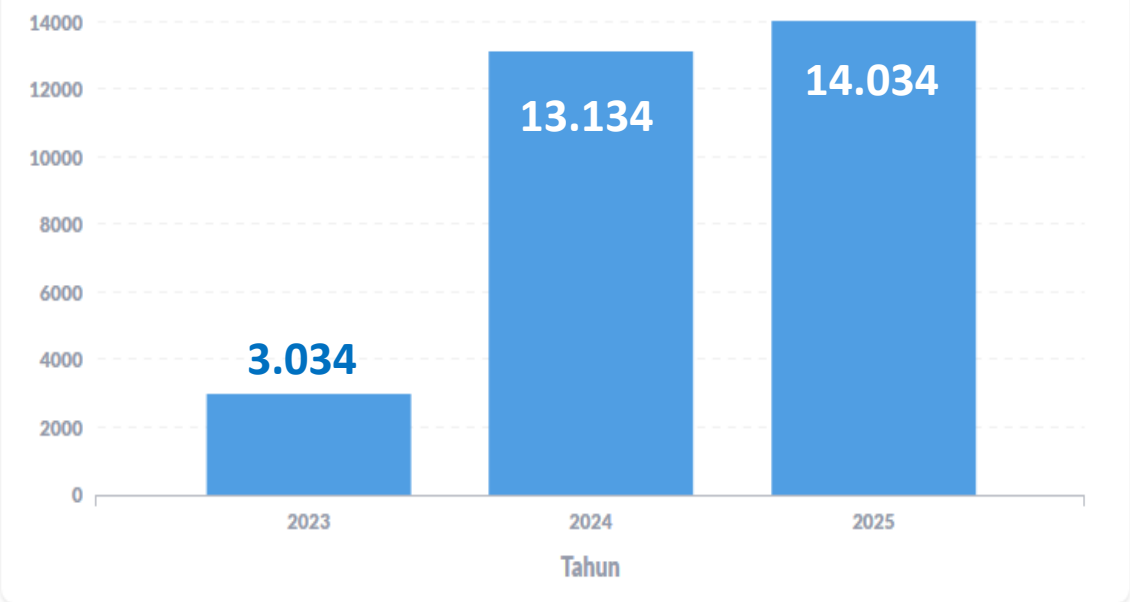

Sumber : KNEKS, Oktober 2025

KNEKS Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
KEMENTERIAN UMKM
KOMDIGI

Platform

KAMPUS UKM INNOVATIVE - COMPETITIVE
DEA Digital Entrepreneurship Academy
digitalent

3rd Pillars Implementation : Funding for Halal *Start-up*

Halal Start-up Demo Day 2025

KNEKS
ISEF
HSDD2025
DJHIWA - DARE TO JUMPSTART HALAL INDUSTRY WITH AMBITION
21+ M
INVST & TRANSK
14 KOMITMEN DARI 8 INDUSTRI
10+ K / L
KNEKS, BI, Kementerian UMKM, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Ekraf, Kementerian Industri, Bappenas dan OJK
10+ VC, BANK, FINTECH
HASAN VC, AMVESINDO, BUBU.com, GOBI Partner, BTPN Ventura Syariah, ANGIN Advisory, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, Maybank Syariah, CIMB Syariah, LBS Urun Dana
20 STARTUP TERBAIK
DARI 8 AKSELERATOR & INKUBATOR
200 PESRTA
Startups, Pemerintah, Investor, VC, Bank, Asosiasi Bisnis/Organisasi, Fintech, Industri
KNEKS Sebagai koordinator inisiatif bersama sejak 2024 dengan AFSI dan HASAN VC
DEKS Bank Indonesia sebagai pendukung utama HSDD 2025 yang dipadukan dengan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) dan acara ini menjadi bagian dari ISEF ke-12
ITS ALWAYS SEEMS IMPOSIBLE UNTIL IT'S DONE
QS. 2 : 286
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"
INGAT QURAN
SUPERTEAM
@KNEKS.ID BY INIBISA - BIWIS

KNEKS Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
BANK INDONESIA BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA
Kementerian PPN/ Bappenas
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
KEMENTERIAN UMKM
EKRAF
Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

Fasilitasi Penguatan UMKM – Zona Kuliner Halal Aman & Sehat

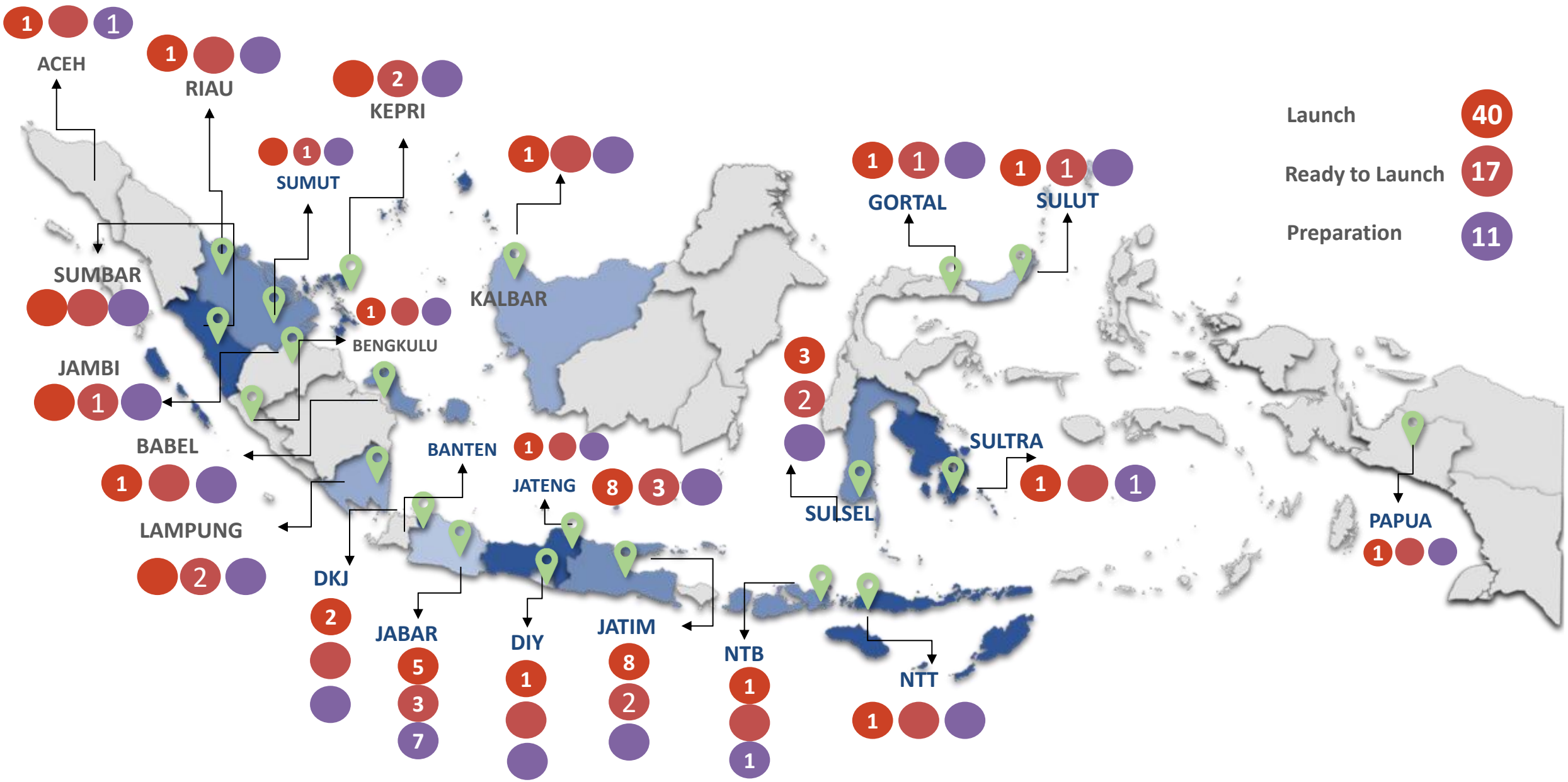

Pembiayaan dan Pendanaan Syariah kepada UMKM

Konsolidasi Pembiayaan/Pendanaan Syariah bagi UMKM Per Juni 2025 (Outstanding) tumbuh 3,85% (YoY) per Juni 2025

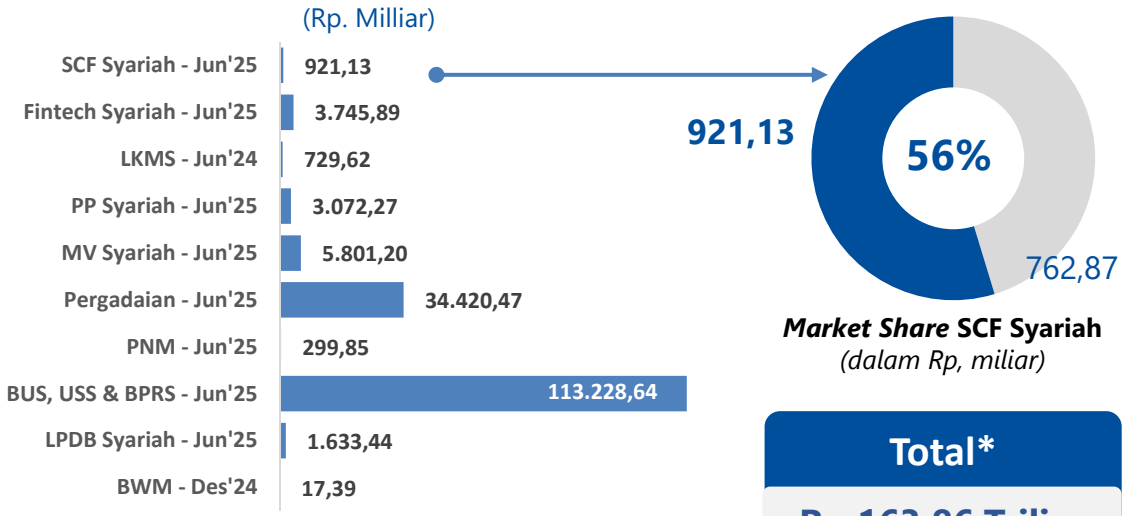
(Rp. Milliar)
SCF Syariah - Jun'25 921,13
Fintech Syariah - Jun'25 3.745,89
LKMS - Jun'24 729,62
PP Syariah - Jun'25 3.072,27
MV Syariah - Jun'25 5.801,20
Pergadaian - Jun'25 34.420,47
PNM - Jun'25 299,85
BUS, USS & BPRS - Jun'25 113.228,64
LPDB Syariah - Jun'25 1.633,44
BWM - Des'24 17,39

***Market Share* SCF Syariah**
(dalam Rp, miliar)

Total*

Rp 163,86 Triliun

*)Periode Juni 2025

Sumber Data: OJK, LPDB, ALUDI, Diolah KNEKS

- Total Pembiayaan/Pendanaan Syariah yang disalurkan kepada UMKM per Juni 2025 mencapai **Rp163,86 Triliun** atau tumbuh sebesar **3,85% YoY**.
- Komposisi pembiayaan ini didominasi oleh **Perbankan Syariah** sebanyak **69,10%** termasuk penyaluran **KUR Syariah** sebesar **Rp 7,79 T**, dan **21%** dari **PNM** (termasuk penyaluran UMi Syariah sebesar **Rp 3,78 T**), **9,90%** berasal dari Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah, termasuk pendanaan dari Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), wakaf, dan instrumen keuangan syariah lainnya.
- Rasio Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS, UUS & BPRS) terhadap UMKM baru mencapai **17%**, hal ini masih **77,27%** dari Target RPJMN dan MEKSI sebesar 22%.
- Penerbitan Saham/Sukuk UMKM melalui SCF Syariah Per Juni 2025 mencapai **Rp 921,13 M** dengan *Market Share* Syariah sebesar **56%**. Didominasi instrumen **sukuk** dari **214 UKM** senilai **Rp 414,57 M** yang tumbuh **82% (YoY).**

Perkembangan Pembiayaan UMKM dari Perbankan Syariah & UUS PNM

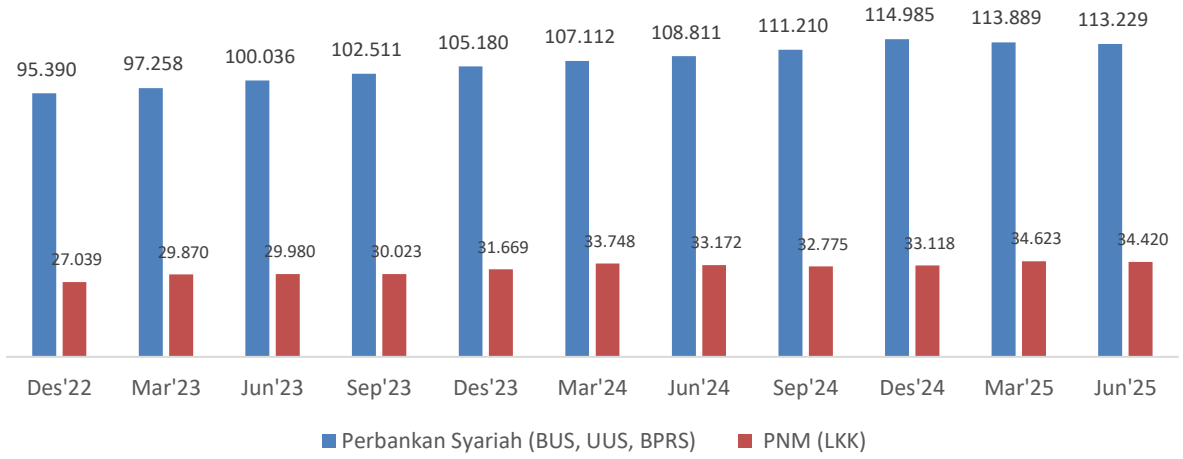

Perkembangan Pembiayaan Syariah UMKM dari LKS Lainnya

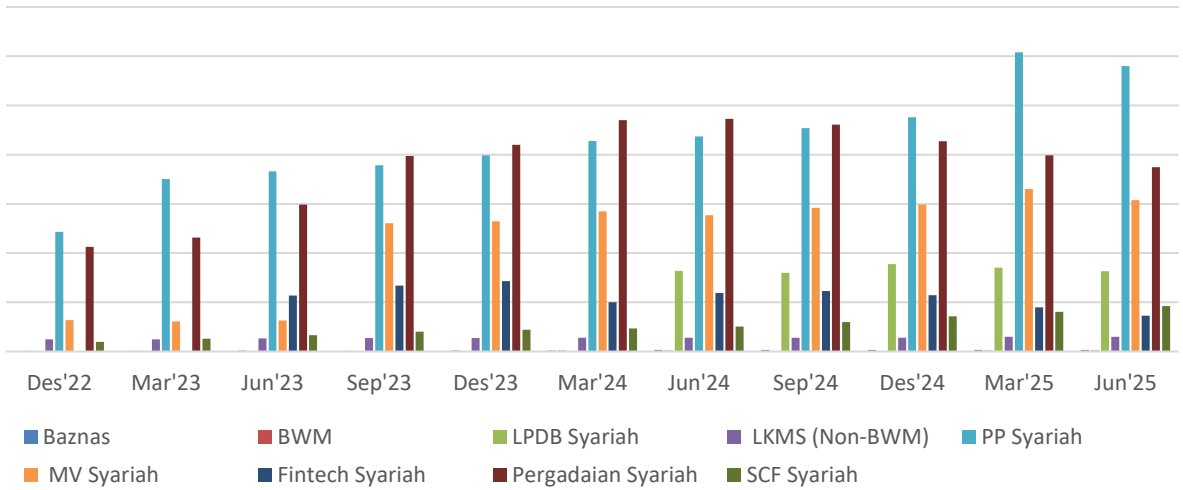

B. EKONOMI SYARIAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

Sinkronisasi MEKSI Dengan RPJPN, RPJMN dan Asta Cita

MEKSI 2025-2029

Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah telah tertuang dalam rancangan akhir RPJPN, rancangan awal RPJMN dan ASTA CITA pemerintah Prabowo-Gibran.

Sehingga penyusunan MEKSI 2025-2029 diseleraskan dengan agenda Pembangunan nasional 5 tahun kedepan dan sebagai acuan rencana kerja baik di pusat maupun daerah.

INDONESIA EMAS 2045
NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN
RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2025-2045

Muatan ekonomi syariah dalam:
- **IE 1** Kesehatan untuk Semua
- **IE 4** Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
- **IE 9** Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
- **IE 11** Stabilitas Ekonomi Makro

Muatan ekonomi syariah dalam:
- Transformasi Ekonomi: **Program Pembangunan (PP)** Ekonomi Syariah
- Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
- Arah Pembangunan Daerah

Muatan ekonomi syariah dalam:
- **CITA 2** Ekonomi Syariah
- **CITA 3** Mengembangkan Industri Kreatif
- **CITA 4** Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional
- **CITA 8** Masyarakat Adil, Makmur dan Harmonis

Dukungan Ekonomi & Keuangan Syariah Terhadap Asta Cita

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029

Prioritas Nasional (PN) 2,
Program Prioritas (PP) Ekonomi Syariah

Kegiatan Prioritas (KP) 1
Industri Halal dan UMKM Halal

Peran/Dukungan Ekonomi & Keuangan Syariah Terhadap Program Strategis Nasional Pemerintah (Asta Cita)

- Swasembada Pangan
- Makan Bergizi Gratis
- Perumahan
- **Penguatan UMKM**
- dll

Arah Kebijakan Ekonomi Syariah Dalam RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional (PN) 2:
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, **Ekonomi Syariah**, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Sasaran: Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan
Indikator: Peringkat ekonomi syariah Indonesia di tingkat dunia (GIEI) → Peringkat 3 (2023); Peringkat 1 (2029)

Program Prioritas (PP):
Ekonomi Syariah

Sasaran: Menguatnya peran ekonomi dan keuangan syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi
Indikator: Kontribusi PDB Syariah (%)* → 46,72 (2023); 56,11 (2029)*

Kegiatan Prioritas (KP) 1:

Industri Halal dan UMKM Halal

Sasaran: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri dan UMKM Halal
Indikator :
- Presentase Peingkatan Daya Saing Industri yang memproduksi Produk Halal (%) 4,46 (2025); 7 (2029)
- Pertumbuhan Pariwisata Ramah Muslim (%) -> 20,41 (2023); 13,08 (2029)

Proyek Prioritas:
1. Pengembangan Industri Makanan – Minuman Halal
2. Pengembangan Industri Farmasi dan Kosmetik Halal
3. Pengembangan Industri Fesyen Muslim
4. Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim
5. Penguatan Halal Value Chain
6. Penguatan Promosi Industri Halal

Kegiatan Prioritas (KP) 2:

Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional

Sasaran: Meningkatnya ekspor produk halal berdaya saing global dan menguatnya kerjasama ekonomi syariah internasional
Indikator :
- Nilai Ekspor Halal/PDB (%) → 3,69 (2023); 3,92 (2029)

Proyek Prioritas:
1. Penguatan Ekspor Halal
2. Penguatan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional

Kegiatan Prioritas (KP) 3:

Ekosistem Halal

Sasaran: Menguatnya ekosistem halal pendukung pertumbuhan ekonomi syariah

Indikator :
- Jumlah Produk Tersertifikasi Halal -> 2,17 Juta (2023); 7 Juta (2029)

Proyek Prioritas*:
1. Akselerasi Fasilitasi Sertifikasi Halal
2. Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal
3. Pengembangan Kebijakan Ekosistem Halal
4. Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal
5. Pengembangan Riset Pendukung Ekosistem Halal
6. Pengembangan Penghitungan PDB Syariah

Kegiatan Prioritas (KP) 4:

Keuangan Syariah

Sasaran: Meningkatnya peran keuangan syariah mendukung perekonomian nasional
Indikator :
- Aset keuangan syariah / PDB (%) → 42,67 (2023); 51,42 (2029)

Proyek Prioritas*:
1. Penguatan Perbankan Syariah
2. Penguatan Pasar Modal Syariah
3. Penguatan IKNB Syariah

Kegiatan Prioritas (KP) 5:

Dana Sosial Syariah

Sasaran: Meningkatnya peran dana sosial syariah mendukung perlindungan sosial nasional

Indikator :
- ZIS-DSKL / PDB (%) → 0,155 (2023); 0,208 (2029)
- Aset wakaf uang / PDB (%) → 0,011 (2023); 0,027 (2029)

Proyek Prioritas*:
1. Akselerasi bauran ZISWAF dan keuangan syariah
2. Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF

* Sementara menggunakan nilai indikator Pangsa Aktivitas Usaha Syariah (%) sebagai proksi

Sumber: Bappenas

Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2025-2029

Ekonomi Syariah | KNEKS — Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

VISI

PENGARUSUTAMAAN EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS EKONOMI SYARIAH DUNIA

MISI

- Menjaga Agama
- Menjaga Kesehatan
- Menjaga Intelektual
- Menjaga Keberlanjutan
- Menjaga Kesejahteraan Ekonomi

TUJUAN

MENINGKATNYA KONTRIBUSI EKONOMI SYARIAH TERHADAP EKONOMI NASIONAL

SASARAN STRATEGIS

- Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Halal
- Meningkatnya Ekspor Produk Halal dan Menguatnya Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional
- Meningkatnya Peran Keuangan Syariah Mendukung Perekonomian Nasional
- Meningkatnya Peran Dana Sosial Syariah Mendukung Perlindungan Sosial Nasional
- Menguatnya Ekosistem Halal Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah

STRATEGI UTAMA EKONOMI SYARIAH

Pilar 1 — Penguatan Industri Halal dan UMKM Halal
- Hulunisasi Bahan Baku Halal
- Hilirisasi Dan Industrialisasi
- Pariwisata Ramah Muslim Dan Ekonomi Kreatif
- Sistem Ketelusuran Halal Terintegrasi
- UMKM Industri Halal Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing

Pilar 2 — Penguatan Ekspor Halal & Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional
- Produk Halal Andalan Ekspor
- Akses Pasar Ekspor Produk Halal Ke NTE Prioritas
- Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional
- Ekosistem Haji Dan Umrah

Pilar 3 — Penguatan Keuangan Syariah
- Struktur Dan Ketahanan Industri
- Karakteristik/Ke-khas-an Keuangan Syariah
- Peran Keuangan Syariah Dalam Ekosistem Syariah
- Peran Keuangan Syariah Dalam Perekonomian Nasional
- Modernisasi Koperasi Syraih Sector Produksi Dan Keuangan Mikro

Pilar 4 — Penguatan Dana Sosial Syariah
- Tata Kelola Institusi Pengelola Zakat Wakaf
- Afirmasi Pemerintah
- Peran Zakat Wakaf Dalam Perlindungan Sosial
- Peran Zakat Wakaf Dalam Ekosistem Syariah

Pilar 5 — Penguatan Ekosistem Pendukung
- Iptek Inovasi, Digitalisasi 4.0, SDM Unggul Berbasis Nilai Syariah
- Layanan Digital Data Ekonomi Syariah Dan PDB Syariah
- Regulasi Dan Kelembagaan Ekonomi Syariah
- Inklusi, Literasi, Promosi, Dan Branding Ekonomi Syariah
- Akselerasi Sertifikasi Halal
- Kemitraan Rantai Nilai UMK-UMB

FONDASI TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH

PRODUKTIVITAS EKONOMI | PEMERATAAN EKONOMI | STABILITAS EKONOMI | PERLINDUNGAN SOSIAL

Program Prioritas
UMKM Industri Halal Bernilai Tambah dan Berdaya Saing **(P.1.5)**

Penguatan inkubasi dan akselerasi (1) bisnis wirausaha pemula industri halal berbasis iptek, inovasi, dan kreativitas (R.1.5.1); (2) UMKM Industri Halal (R.1.5.2); (3) Startup industri halal (R.1.5.3)

Program Prioritas
Peran Keuangan Syariah Dalam Perekonomian Nasional (P.3.4)

Peningkatan Layanan Keuangan Syariah Kepada **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (R 3.4.5)**

Program Prioritas
Akselerasi Sertifikasi Halal Terarah (P.5.5)

Percepatan sertifikasi halal Usaha Mikro dan Kecil (UMK) **(R 5.5.1)**

Program Prioritas
Penguatan kemitraan rantai nilai halal UMK-UMB (P.5.6)

Penguatan kemitraan UMK (usaha mikro kecil) dan UMB (usaha menengah besar) di rantai nilai industri halal hulu-hilir **(R 5.6.1)** dan Penguatan sarana dan prasarana pascapanen dan produksi halal bersama untuk UMKM industri halal **(R 5.6.2)**

C. SINERGI & KOLABORASI PENGEMBANGAN UMKM INDUSTRI HALAL

Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah

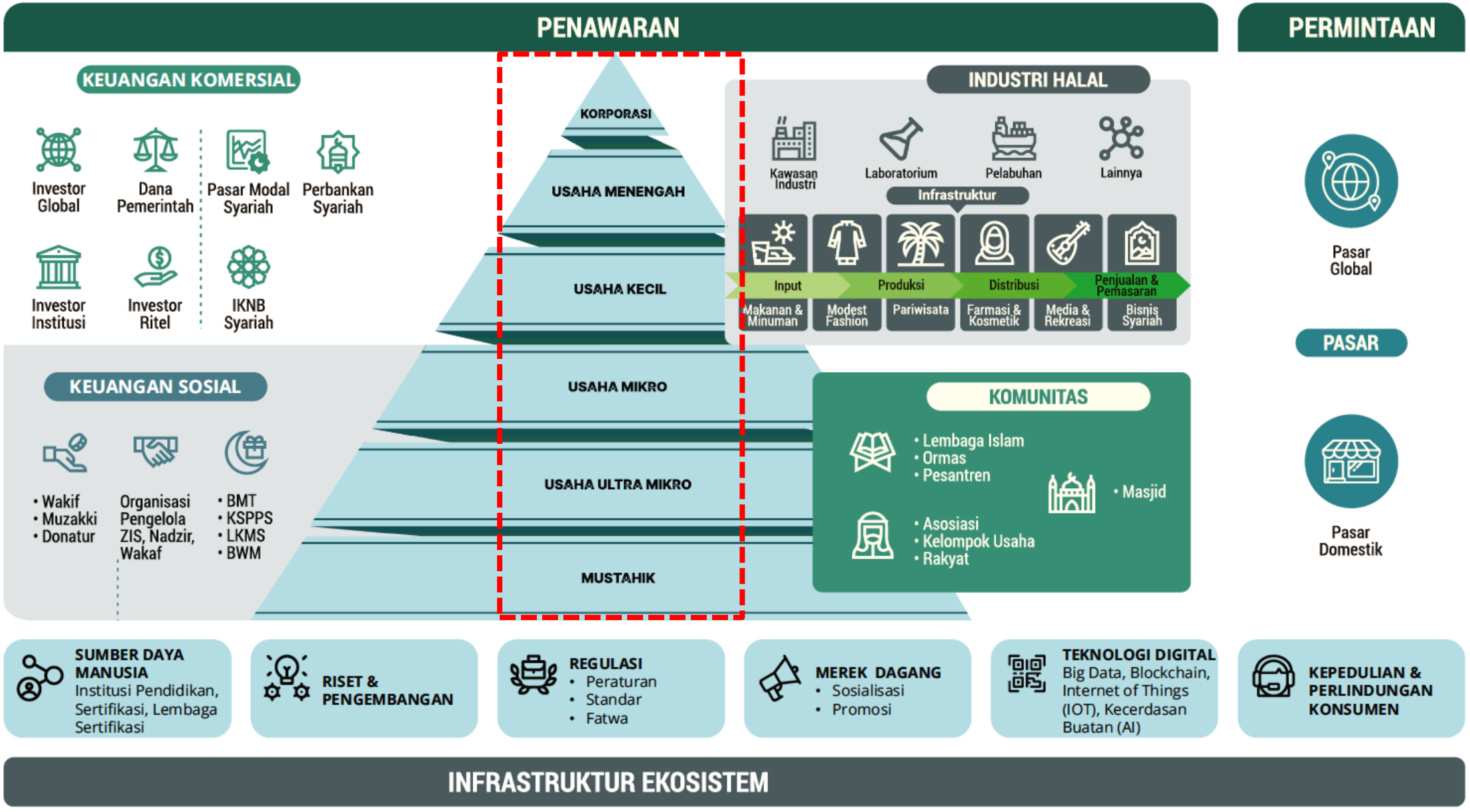

Dimensi Bisnis Syariah

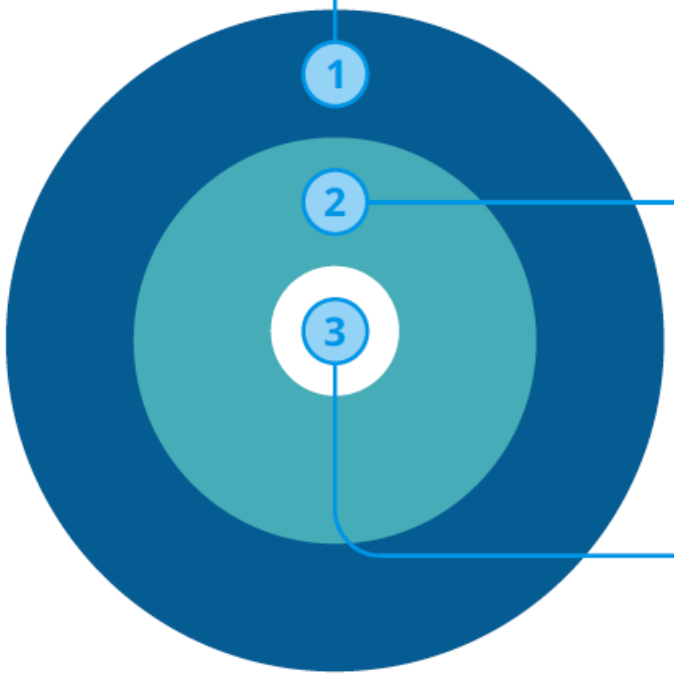

Kategori 1

Produk: barang & jasa

Kategori 2

- Produk
- Sumber Pembiayaan

Kategori 3

- Produk
- Sumber Pembiayaan
- Business Conduct

Dimensi Produk

√	√	x
Bersertifikat halal	Belum bersertifikat halal namun tidak mengandung zat haram	Haram

Dimensi Pembiayaan

√	●	x
Non Riba	% x Non Riba (Surat Berharga Syariah, Pembiayaan LKS & Ekuitas)	Riba

Dimensi Business Conducts

√	√	√
Etika Bisnis Syariah	Kepedulian Sosial	Kelestarian Lingkungan

Strategi Pengembangan UMKM Industri Halal

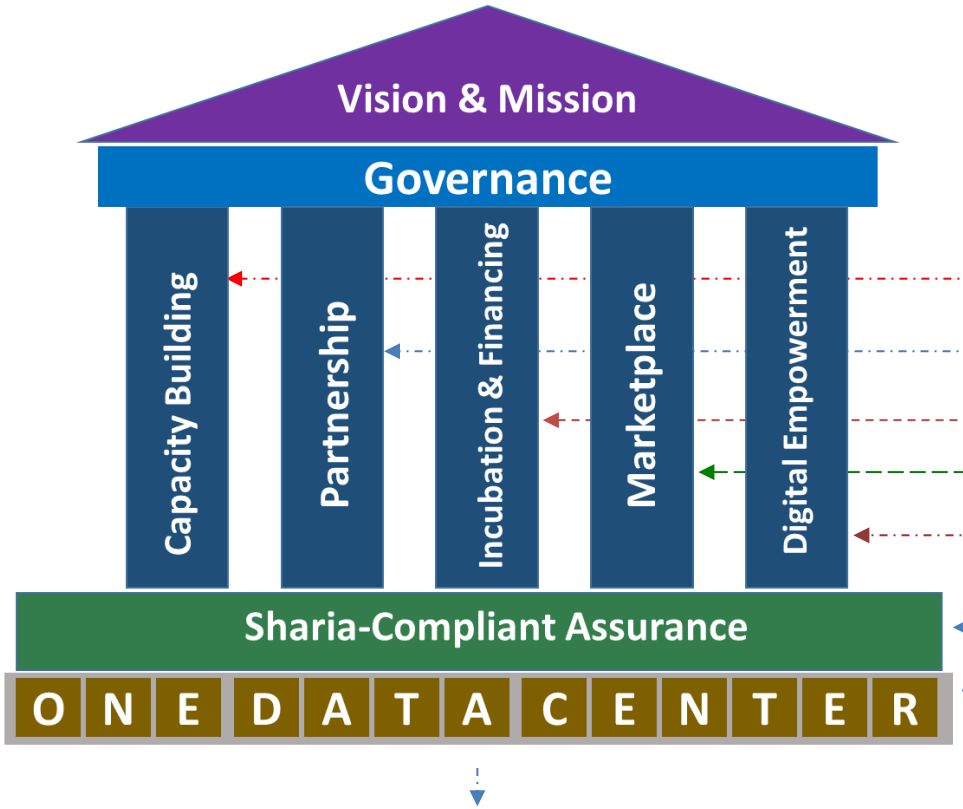

Data Warehouse UMKM Industri Halal

Laporan Digital untuk mendukung kebijakan, analisa pasar, pemetaan dan lain sebagainya

Jaringan Inkubasi & Pusat Pelatihan

Titik Pusat Pembelajaran dan Pengembangan

Tim Kerja Ekosistem UMKM Industri Halal

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait

Platform Pembiayaan Terintegrasi

***Scoring Engine* untuk menilai kesesuaian Pembiayaan dan Pendanaan Syariah untuk setiap skala usaha**

Supplier Management System

***Scoring Engine* untuk menilai Kelayakan**

Pustaka Aplikasi Digital

Rekomendasi Aplikasi yang sesuai kebutuhan UMKM

Halal Traceability

Farm to Table Process Traceability

Sharia Center of Excellent

***Big Data Analytics* berbasis AI**

Pilar 1 *Capacity Building* UMKM

Modul & Video Pembinaan Dasar UMKM Berbasis Syariah

Kolaborasi dgn:

KNEKS · SBMITB School of Business & Management Institut Teknologi Bandung · BSI Bank Syariah Indonesia · STP IPB Science Techno Park · UKMC FEB UI · ORANGE Pusat Inkubator Bisnis Universitas Padjadjaran · Institut Tazkia

Modul UMKM Syariah Berbasis Digital

Tersedia di
Learning Management System

DEA Digital Entrepreneurship Academy

KAMPUS INNOVATIVE - COMPETITIVE UKM

Pemasaran Syariah Berbasis Digital
MODUL ETIKA BISNIS
PRINSIP DAN ETIKA BISNIS SYARIAH BERBASIS DIGITAL
Akuntansi dan Fintech Syariah Berbasis Digital
Pengajuan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Makanan dan Minuman

KNEKS Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kolaborasi dengan:

KOMINFO · BPJPH · Institut Tazkia · idEA Asosiasi E-Commerce Indonesia · Zahir · ALAMI · evermos

Modul Investor

Modul UMKM

Modul & Video Securities Crowdfunding Syariah UMKM

KNEKS
PENGENALAN SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH
Literasi SCF Syariah untuk Calon Investor
by Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syaria...
Playlist · 5 videos · 463 views
Play all

MENGENAL SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH
Literasi SCF Syariah untuk Calon Penerbit ...
by Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syaria...
Playlist · 5 videos · 446 views
Play all

Modul & Video Pendampingan Akses Pembiayaan/ Pendanaan Syariah UMKM

Melakukan Pendampingan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha
Melakukan Pendampingan Akses Pembiayaan UMKM
Melakukan Pendampingan Restrukturisasi Perusahaan
Melakukan Pendampingan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan
Melakukan Pendampingan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariahdalam Aktivitas Usaha, Pembiayaan dan Pendanaan
Melakukan Pendampingan Pengelolaan Dana Pembiayaan UMKM
Melakukan Pendampingan Pendanaan Investasi bagi UMKM
Melakukan Pendampingan Mengelola Dana Investasi UMKM

Pilar 2 *Partnership*

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kolaborasi *Capacity Building* UMKM Dan *Digital Empowerment* UMKM

KOMINFO
KEMENKOPUKM

Zona Kuliner Halal Aman & Sehat Dan Kolaborasi *Halal Assurance* UMKM

KEMENKOPUKM
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BANK INDONESIA
BPJPH

Sinergi Kolaborasi Pembiayaan Syariah Terintegrasi Bagi UMKM

KEMENKOPUKM
OJK
BANK INDONESIA
KADIN INDONESIA
LPDB KUMKM
Mitra untuk Bangsa
BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Percepatan Ekspor Indonesia Halal Export Incorporated (IHEI)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BANK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Perindustrian
KEMENKOPUKM
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BRIN
BPJPH
Indonesia Eximbank
KADIN INDONESIA
LPDB KUMKM

Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES)

BAPPENAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
OJK
BANK INDONESIA
KEMENKOPUKM
BPJPH
Kementerian Perindustrian
BRIN

Pilar 4 *Market Access* UMKM

Marketplace Pemerintah untuk UMKM

PaDi UMKM
Pasar Digital UMKM Indonesia

Platform hasil besutan Telkom Indonesia yang diinisiasi oleh **Kementerian BUMN**. Platform ini bertujuan untuk mendorong BUMN belanja Produk **UKM**

KEDAI LELANG UMKM

KEDAI Lelang UMKM dilaksanakan dalam rangka memasyarakatkan dan menggali potensi lelang sukarela produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di **wilayah kerja kantor penyelenggara lelang** Kementerian Keuangan.

bela pengadaan

Aplikasi yang dikelola oleh **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)** melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace

Marketplace Produk Halal

tokopedia salam

blibli Hasanah

Shopee Bärokäh
Pusat Busana & Kecantikan Muslimah

Lazada Amanah

Southeast Asia's Islamic Startup Landscape

Sources: TechinAsia (March 2023)

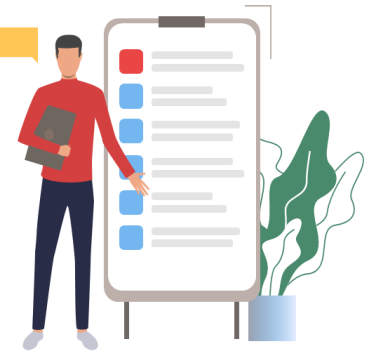

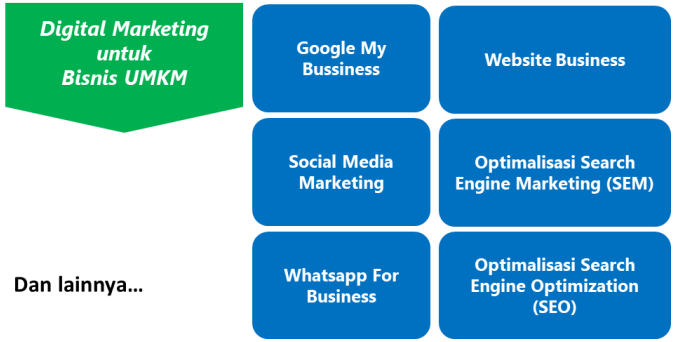

Indonesia merupakan negara di ASEAN yang memiliki banyak *start-up digital* yang dapat dimanfaatkan UMKM.

Penggunaan Aplikasi Digital akan memberikan dampak bagi UMKM, diantaranya:

1. Peningkatan Penjualan & Akses Pasar;
2. Peningkatan Efisiensi Operasional & Produktivitas Karyawan;
3. Pengelolaan Keuangan & Akses Permodalan yang lebih baik;

Pilar 3 Inkubasi dan Pembiayaan/Pendanaan Syariah Terintegrasi

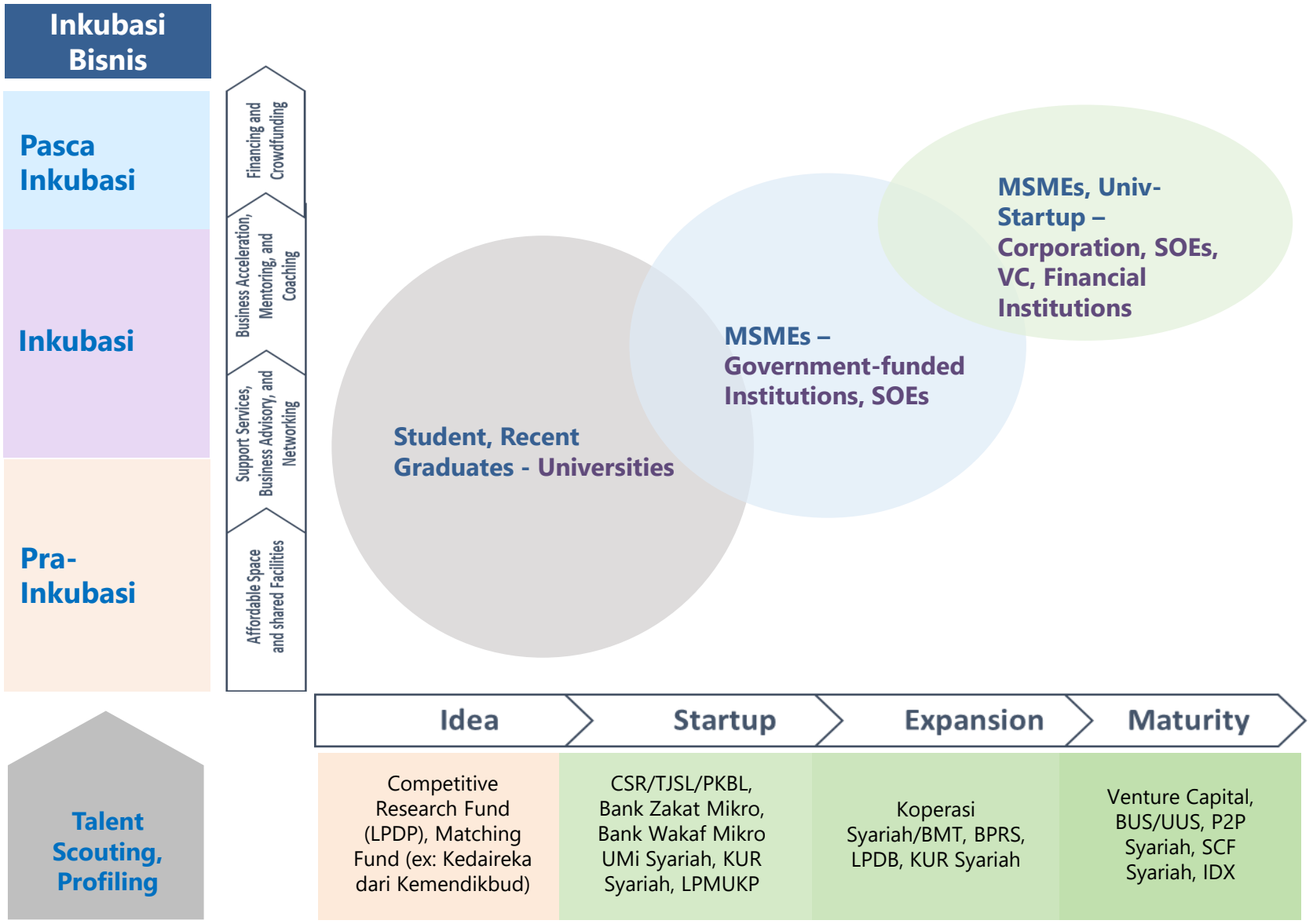
Inkubasi Bisnis
Pasca Inkubasi
Inkubasi
Pra-Inkubasi
Financing and Crowdfunding
Business Acceleration, Mentoring, and Coaching
Support Services, Business Advisory, and Networking
Affordable Space and shared Facilities
Student, Recent Graduates - Universities
MSMEs – Government-funded Institutions, SOEs
MSMEs, Univ-Startup – Corporation, SOEs, VC, Financial Institutions
Idea
Startup
Expansion
Maturity
Talent Scouting, Profiling
Competitive Research Fund (LPDP), Matching Fund (ex: Kedaireka dari Kemendikbud)
CSR/TJSL/PKBL, Bank Zakat Mikro, Bank Wakaf Mikro UMi Syariah, KUR Syariah, LPMUKP
Koperasi Syariah/BMT, BPRS, LPDB, KUR Syariah
Venture Capital, BUS/UUS, P2P Syariah, SCF Syariah, IDX
Pembiayaan

- **Jaringan Inkubator Bisnis Syariah**, perlu dikembangkan untuk menghubungkan, bersinergi, dan melacak inisiatif & upaya inkubasi.
- **Pembiayaan Terintegrasi** pembiayaan/pendanaan syariah tersedia untuk berbagai tahapan usaha.
- **Pipeline Berkelanjutan**, aliran berkelanjutan (masuk dan keluar) dari inkubee yang telah disaring, agar siap dipasarkan dengan opsi pembiayaan/pendanaan syariah yang tersedia di setiap tahapan.
- **Sertifikasi Pendamping UMKM sebagai Sharia Finance/ Investment Advisor**

Pilar 3 *Islamic Financial Hub Ecosystem*

- Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi
- Inkubator Bisnis Non-Perguruan Tinggi
- Rumah BUMN

INKUBASI BISNIS

UMKM INDUSTRI HALAL

PEMBINAAN PELATIHAN

ASOSIASI BISNIS

- BES-KADIN
- KPMI
- OKE OCE
- TDA
- HIPMI
- APPHI

DIGITALISASI TRANSAKSI & LAPORAN KEUANGAN UMKM

LEGAL SUPPORT
(Perizinan, Sertifikasi, Paten Right, Dok Ekspor etc)

***CREDIT SCORING* UMKM**

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

BUSINESS MATCHING
ISLAMIC FINANCIAL HUB

Kegiatan *Business Matching* Pembiayaan

Platform Digital *Business Matching*

DANA SOSIAL

Bank Microfinance Desa/Mesjid BAZNAS, Bank Wakaf Mikro

DANA PROGRAM

KUR Syariah, UMi Syariah, Dana Bergulir Syariah LPDB

DANA KOMERSIAL

Perbankan Syariah (BUS, UUS, BPRS) Perusahaan Pembiayaan Syariah, Pergadaian Syariah, LKMS/IKMS, Modal Ventura Syariah, Peer to Peer Syariah dan SCF Syariah

Pilar 3 K/L Dalam Sinergi dan Kolaborasi *Business Matching* 2025

Anggota KNEKS

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

- Sinergi & Kolaborasi Lintas K/L dan *Stakeholder* terkait lainnya
- Dukungan Pelaksanaan Kegiatan
- Monitoring dan Evaluasi

BANK INDONESIA BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA	OJK OTORITAS JASA KEUANGAN	KEMENTERIAN UMKM	KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA	EKRAF Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
Bulan Pembiayaan Syariah (Rangkaian ISEF) ▪ Kick Off (21/02/25) ▪ FeSyar Sumatera (Lampung) ▪ FeSyar KTI (Pontianak) ▪ FeSyar Jawa (Surabaya) ▪ Business Deals (Jakarta)	Forum Edukasi dan Temu Bisnis (FEBIS)	1. Kedeputian Usaha Kecil: Bisnis Layak Funding (BISLAF) 2. Kedeputian Usaha Mikro: Memberikan rekomendasi/ referral UMKM binaan untuk dapat difasilitasi business matching pada kegiatan BI dan/atau OJK	Memberikan rekomendasi/referral UMKM binaan untuk dapat difasilitasi business matching pada kegiatan BI, OJK dan/atau KemenUMKM	Memberikan rekomendasi/referral UMKM binaan untuk dapat difasilitasi business matching pada kegiatan BI, OJK dan/atau KemenUMKM

Platform Digital Business Matching (DBM)

Mock-up Hasil Rekomendasi Pembiayaan pada *Platform Digital Business Matching*

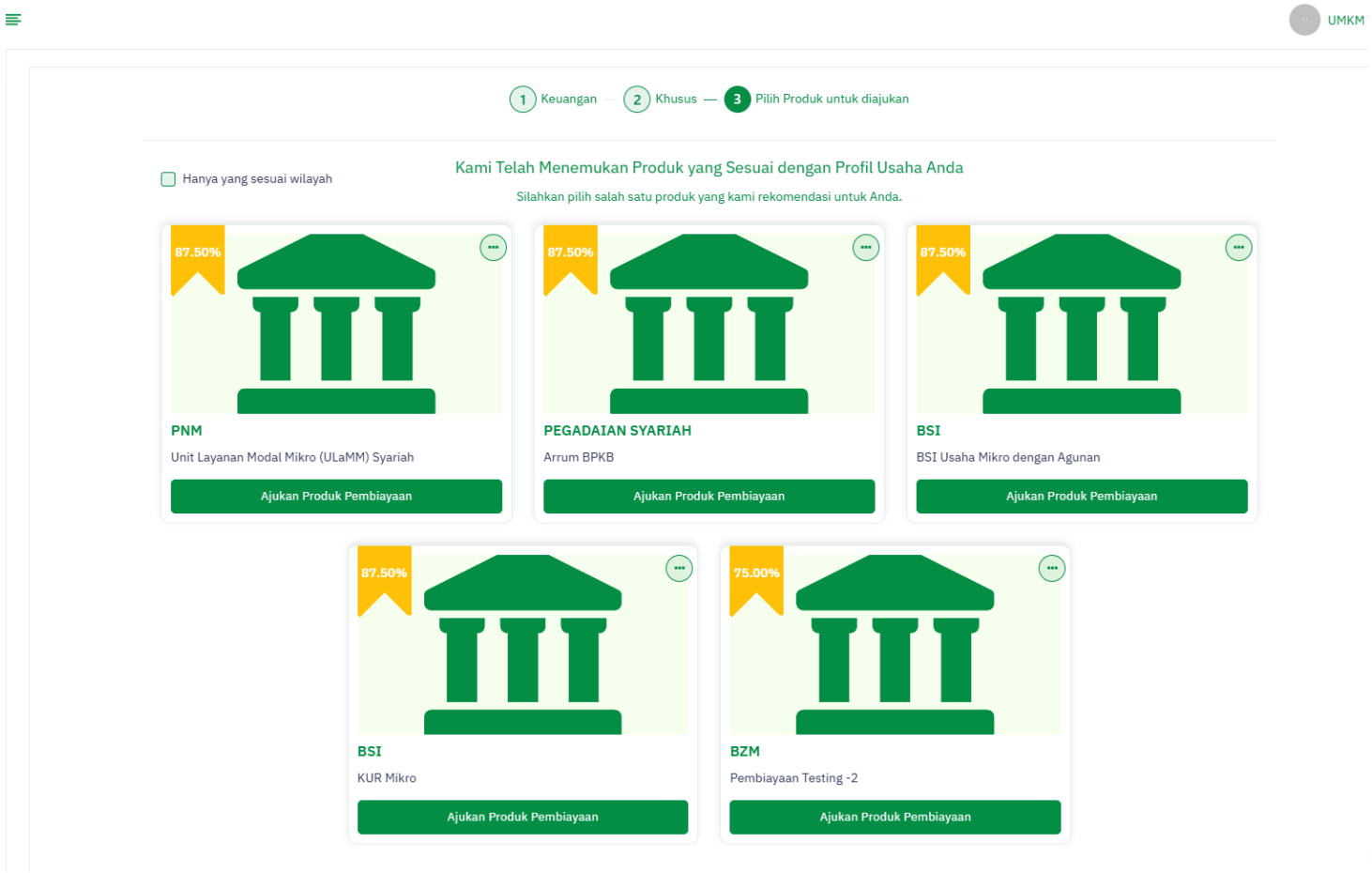

Visit & Register

https://dbm.kneks.go.id/

User Guidelines & Video Tutorial Platform DBM

https://bit.ly/GuidlinesDBM

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Komplek Kementerian Keuangan
Gedung Djuanda II Lt. 17
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710

Follow us!

@kneks.id

@kneks.id

@kneks_id

Komite Nasional Ekonomi
dan Keuangan Syariah

www.kneks.go.id

Terima Kasih